



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUBACHRAN HARDI MULYONO**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **18219**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.705.400.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1190 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di BANTUL, WARISAN Rp. 595.000.000
2. Tanah Seluas 305 m<sup>2</sup> di BANTUL, WARISAN Rp. 152.500.000
3. Tanah Seluas 513 m<sup>2</sup> di SLEMAN, WARISAN Rp. 153.900.000
4. Tanah Seluas 523 m<sup>2</sup> di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 261.500.000
5. Tanah Seluas 290 m<sup>2</sup> di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 1985 m<sup>2</sup> di BANTUL, WARISAN Rp. 992.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m<sup>2</sup>/33 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **771.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 291.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV SE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **250.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	125.547.008
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.851.947.008
III. HUTANG	Rp.	540.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.311.947.008

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.